



**PUTUSAN**

Nomor 471/Pdt.G/2017/PA Plp..

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat kediaman di Lingkungan Pusung, RT.001 RW. 001, Kelurahan Bosso, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut Penggugat.

melawan

TERGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pelaut, bertempat kediaman di Jalan Pongsimpin, Kelurahan Mungkajang, Kecamatan Mungkajang, Kota Palopo, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan register Nomor 471/Pdt.G/2017/PA Plp.. tanggal 21 Agustus 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2011 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 6 Dzulqaidah 1438 H., Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Lingkungan Pusung, Kelurahan Bosso, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX, tertanggal 14 Oktober 2011,

Put. No 471/Pdt.G/2017/PA.Plp. Hal 1 dari 12



yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu;

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Lingkungan Pusung, Kelurahan Bosso, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu selama 3 tahun;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi pada bulan Oktober 2014 Tergugat pamit ke Bastem, namun tidak pernah kembali menemui Penggugat sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 2 tahun 10 bulan lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
5. Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan izin untuk bercerai berdasarkan Surat Keputusan/Keterangan Nomor Nomor XXXXXX, yang dikeluarkan oleh Bupati Luwu tanggal 17 Juli 2017;
6. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa, manakala perkara tersebut diputuskan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Palopo, mohon untuk menyampaikan salinan Putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan;

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo Cq. majelis hakim yang memeriksa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu dan Kecamatan Mungkajang, Kota Palopo;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## Subsider

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaas panggilan Nomor 471/Pdt.G/2017/PA Plp. tanggal 28 Agustus 2017 dan 11 September 2017, namun kemudian digabungkan dan Relaas Panggilan dengan nomor yang sama tanggal 25 September 2017 serta 25 Oktober 2017 telah dipanggil melalui Radio tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir dalam persidangan, dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan atas perkara ini tetap dilanjutkan meskipun tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun dari Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil yang berkewajiban untuk memperoleh izin perceraian dari pejabat yang berwenang, oleh karenanya Penggugat telah mendapatkan Surat Izin

Put. No 471/Pdt.G/2017/PA.Plp. Hal 3 dari 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cerai yang dikeluarkan oleh Bupati Luwu dengan Nomor : XXXXXX, tanggal 17 Juli 2017, maka secara administrasi dapat diproses lebih lanjut;

Bahwa, Majelis Hakim memulai pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti:

A. Surat, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu, tanggal 14 Oktober 2011, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya, oleh ketua majelis diberi kode P ;

B. Saksi-saksi:

1. SAKSI, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Pusun, Desa Bosso, Kecamatan Walenrang Utar, Kabupaten Luwu., telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat sebagai saudara kandung bernama PENGGUGAT dan kenal Tergugat sebagai ipar bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2011 yang hingga sekarang telah mencapai kurang lebih 7 tahun lamanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua saksi di Lingkungan Pusun, Kelurahan Bosso, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu selama 3 tahun;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun pada bulan Oktober 2014 Tergugat pamit pergi ke Bastem untuk mengunjungi kerabatnya

Put. No 471/Pdt.G/2017/PA.Plp. Hal 4 dari 12



di sana, namun setelah itu Tergugat tidak pernah kembali menemui Penggugat, tidak pernah ada kabar beritanya, dan tidak pula diketahui dimana keberadaannya hingga saat ini di wilayah Republik Indonesia yang hingga sekarang telah mencapai kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan sepengetahuan saksi selama ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;
  - Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari tahu tentang tempat tinggal Tergugat namun tidak berhasil, bahkan keluarga Tergugat sendiri tidak mengetahui dimana Tergugat sekarang berada;
  - Bahwa sejak pergi meninggalkan rumah, tidak pernah ada jaminan nafkah dari Tergugat kepada Penggugat hingga saat ini;
  - Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat namun tidak berhasil, karena Tergugat telah menyusahkan Penggugat baik lahir maupun bathin dan sampai saat ini tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa Tergugat akan kembali;
2. Jumriana binti Bagari, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan guru, bertempat tinggal di Dusun Pusun, Desa Bosso, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu., memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat bernama Hasni, S.Pd binti Haeruddin dan kenal Tergugat bernama TERGUGAT;
  - Bahwa Penggugat adalah sepupu satu kali, sedang Tergugat adalah ipar;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2011 yang hingga sekarang telah mencapai kurang lebih 7 tahun lamanya;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak;



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua saksi di Lingkungan Pusun, Kelurahan Bosso, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu selama 3 tahun;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah kediaman Penggugat dan Tergugat karena kami tinggal bertetangga di Walenrang;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun pada bulan Oktober 2014 Tergugat pamit pergi ke Bastem untuk mengunjungi kerabatnya di sana, namun setelah itu Tergugat tidak pernah kembali menemui Penggugat, tidak pernah ada kabar beritanya, dan tidak pula diketahui dimana keberadannya hingga saat ini di wilayah Republik Indonesia yang hingga sekarang telah mencapai kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan sepengetahuan saksi selama ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari tahu tentang tempat tinggal Tergugat namun tidak berhasil, bahkan keluarga Tergugat sendiri tidak mengetahui dimana Tergugat sekarang berada;
- Bahwa sejak pergi meninggalkan rumah, tidak pernah ada jaminan nafkah dari Tergugat kepada Penggugat hingga saat ini;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat namun tidak berhasil, karena Tergugat telah menyusahkan Penggugat baik lahir maupun bathin dan sampai saat ini tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa Tergugat akan kembali.

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan, sedang Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan;



Bahwa, pada kesimpulannya, Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya serta tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjuklah hal-hal yang tertuang dalam berita acara perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali hidup rukun dan damai dalam membina rumah tangganya seperti semula, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada persidangan perkara ini, Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun atas perintah Ketua Majelis, Tergugat telah dipanggil dengan cara dan tenggang waktu sebagaimana diatur dalam pasal 27 PP.No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam, maka dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, proses pemeriksaan perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena ketidakhadiran Tergugat itu pula, prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan Surat Izin Cerai yang dikeluarkan oleh atasannya, oleh karena itu Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatan Penggugat bermaksud untuk bercerai dengan Tergugat, dengan dalil bahwa telah antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal disebabkan pada bulan Oktober 2014 Tergugat pamit ke Bastem, namun tidak pernah kembali menemui Penggugat sampai sekarang yang sudah berjalan

Put. No 471/Pdt.G/2017/PA.Plp. Hal 7 dari 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 3 tahun lamanya tanpa kabar bahkan tidak diketahui keberadaannya tahun 10 bulan lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa secara yuridis, Penggugat mendalilkan gugatannya dengan mengacu pada ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan alasan perceraian yang diajukan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim memeriksa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti P. Bukti tersebut merupakan akta autentik yang menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup dan bersesuaian dengan aslinya, sehingga akta tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil bukti akta autentik yang nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat. Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan mengenai alasan perceraian, Penggugat mengajukan dua orang saksi. Kedua saksi tersebut secara formil tidak terhalang untuk memberikan keterangan, dan keduanya di muka persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, hal mana keterangan yang diberikan berkaitan satu sama lain dan semuanya mendukung serta meneguhkan dalil gugatan Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil saksi;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat kedua saksi Penggugat mengetahui tentang hal tersebut yaitu tentang terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, yang mana masing-masing saksi menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2014 Tergugat kembali ke Bastem namun Tergugat tidak pernah kembali lagi menemui Penggugat

Put. No 471/Pdt.G/2017/PA.Plp. Hal 8 dari 12

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga sekarang telah mencapai kurang lebih 3 tahun lamanya dan tidak pernah ada kabar beritanya lagi dan tidak pula diketahui dimana keberadaannya hingga saat ini di wilayah Republik Indonesia dan selama itu tidak ada nafkah dari Tergugat, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2017 hingga sekarang yang sudah berjalan kurang lebih 3 tahun lamanya bahkan sudah tidak diketahui keberadaannya;
3. Bahwa selama itu tidak ada nafkah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa unsur terpenting dalam dalil gugatan Penggugat adalah adanya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang berakibat tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga unsur itulah yang harus terbukti dalam kasus ini.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, terlihat keadaan yang saling berhubungan satu dengan lainnya merupakan rangkaian yang menunjukkan adanya ketidakrukunan antara Penggugat dan Tergugat dimana keduanya telah terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang dan tidak adanya upaya untuk memperbaiki hubungan dimana Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat meskipun telah dinasihati, begitu pula dengan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat tanpa memberitahukan keberadaannya atau tempat tinggalnya, Keterkaitan fakta ini membuktikan adanya ketidakrukunan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta yang terbukti tersebut di atas telah cukup membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah

Put. No 471/Pdt.G/2017/PA.Plp. Hal 9 dari 12

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memenuhi kualitas rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sebagai pijakan selanjutnya untuk menilai apakah alasan perceraian yang didalilkan Penggugat telah beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak.

Menimbang, bahwa bagaimanapun beratnya kualitas suatu perselisihan, namun jika kedua belah pihak masih memiliki kehendak untuk menyelesaikannya dengan bijak, maka perselisihan tersebut tentunya akan dapat teratasi. Namun dalam perkara ini, upaya itu tidak dilakukannya lagi yang berarti bahwa Penggugat sudah putus asa dengan masa depan rumah tangganya, bahkan Penggugat lebih memilih untuk mengakhiri ikatan perkawinannya dengan mengajukan gugatan ke pengadilan agama. Tergugat pun di persidangan tidak pernah hadir meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut, melalui Radiogram lewat Radio Republik Indonesia (RRI) sebanyak 2 kali pemanggilan.

Menimbang, bahwa sikap ketidakpedulian yang ditunjukkan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat sudah sampai pada tingkat yang begitu dalam hingga keduanya tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam, pelembagaan perkawinan dimaksudkan sebagai wahana untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, dan untuk mencapai maksud tersebut, baik suami maupun isteri dituntut untuk saling menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin. Jika hal tersebut sudah diabaikan atau sudah tidak berjalan sebagaimana mestinya, maka rumah tangga yang dicita-citakan sulit untuk terwujud. Seperti dalam kasus ini, ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diurai sebelumnya, tidak mencerminkan lagi maksud pelembagaan perkawinan, sehingga mempertahankannya tidak akan menimbulkan *maslahat*, tetapi sebaliknya dapat menimbulkan *mudharat* terutama bagi Penggugat dan Tergugat.

Put. No 471/Pdt.G/2017/PA.Plp. Hal 10 dari 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, pengadilan berkesimpulan bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat telah mencapai kualitas yang begitu dalam, bersifat terus menerus, dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali dan secara yuridis kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur yang dimaksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada sidang Pengadilan Agama Palopo pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2018 Masehi. bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1439 Hijriyah. oleh Tommi, S.HI sebagai Ketua Majelis, Noor Ahmad Rosyidah, S.HI dan Hapsah, S.Ag., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Musdalifah, S.H., MH sebagai Panitera Pengganti, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka

Put. No 471/Pdt.G/2017/PA.Plp. Hal 11 dari 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Noor Ahmad Rosyidah, S.HI.**

**Tommi, S.HI.**

Hakim Anggota II,

ttd

**Hapsah, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Maswarni Bugis, S. Ag**

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,-
- ATK perkara	Rp	50.000,-
- Panggilan	Rp	400.000,-
- Redaksi	Rp	5.000,-
- Meterai	Rp	6.000,-

J u m l a h Rp 491.000,-

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera

Drs. Muh. Tahir, S.H

Put. No 471/Pdt.G/2017/PA.Plp. Hal 12 dari 12

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)